

BAB 5

PENUTUP

Peninjauan kembali paruh waktu (*Midterm Review*) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019, penajaman strategi pencapaian target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk adanya Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan *new initiatives* pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2019. Peninjauan kembali paruh waktu (*Midterm Review*) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 ini sebagai acuan yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap Unit Organisasi Eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan prioritas nasional dengan memenuhi aspek akuntabilitas. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Midterm Review* Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 ini, memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencapai target-target prioritas nasional perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.


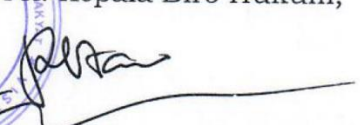
Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Pencapaian target sasaran hasil peninjauan kembali paruh waktu (*Midterm Review*) Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 untuk persiapan tahun 2018 dan perencanaan tahun 2019 yang merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sangat memerlukan pendanaan yang sangat besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hikmad Batara Reza Lubis, SH., MH.
NIP. 197908102005021001